

KOORDINASI CAMAT DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN JEMPANG KABUPATEN KUTAI BARAT

Sari Anisa¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan, Koordinasi Camat dalam Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini dilakukan di kantor Camat Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat.

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya Teknik Sampling menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Koordinasi Camat dengan Petinggi Kampung dan Faktor yang mendukung dan menghambat dalam pembangunan infrastruktur di kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat. Pengumpulan data dilakukan *Key Informan* yaitu Camat di Kecamatan Jempang dan yang menjadi Inforaman yaitu kepala Kampung atau Petinggi kampung di Kampung Tanjung Isuy, Petinggi Kampung Tanjung Jan, Petinggi Kampung Pulau Lanting dan Petinggi Kampung Tanjung Jone, Kapolsek Tanjung Isuy, Koramil Tanjung Isuy serta Masyarakat sekitar Kampung Tanjung Isuy, Kampung Tanjung Jan, Kampung Pulau Lanting dan Kampung Tanjung Jone. Analisis yang di gunakan adalah Analisis Data Kualitatif Model Interaktif menurut versi Mathew B. Miles dan A. Mchael Huberman.

Hasil penelitian dari Koordinasi Camat dalam Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat dilakukan dalam bentuk Koordinasi Vertikal dan Koordinasi Horizontal. Koordinasi vertikal dilakukan dari Camat sebagai Pimpinan pemerintah dengan Kepala Kampung, yang melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan setiap tahun dan pada rapat koordinasi tingkat kecamatan yang diadakan sewaktu-waktu bila diperlukan. Sedangkan Horizontal dilakukan camat dengan aparat terkait yaitu Koramil dan Kapolsek dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan Pembangunan di wilayah Kecamatan Jempang.

Kata Kunci : *Koordinasi, pembangunan, infrastruktur.*

Pendahuluan

Pembangunan Infrastruktur merupakan pelaksanaan kegiatan yang merujuk pada hasil nyata dari sebuah pembangunan. Pembangunan infrastruktur ini

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: annisayannisa0599@gmail.com

dilakukan dari pemerintah pusat yang merupakan pusat pemerintahan sampai pada tingkat pemerintahan terendah dalam hal ini kecamatan. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah sistem yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan pemerintahan Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dalam Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah disusun melalui perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pihak kecamatan tidak lepas dari koordinasi yang dilakukan oleh Camat selaku orang yang memiliki jabatan dan wewenang tertinggi didalam instansi kecamatan tersebut. Koordinasi yang dilakukan melalui forum formal dilakukan dengan menggunakan suatu wadah yang dapat dipergunakan sebagai cara untuk melakukan tukar pikiran dan informasi, mengadakan konsultasi, mengadakan kerjasama dalam pemecahan suatu masalah dalam pengambilan keputusan bersama pelaksanaan tugas, serta hal-hal yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh instansi yang bersangkutan. Koordinasi yang dilakukan diatas dapat bersifat interen dalam lingkungan suatu koordinasi, terutama bagi masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan secara fungsional oleh unit-unit kerja yang berwenang dan bersifat segera untuk diselesaikan.

Sebagai lembaga perpanjangan tangan bupati, pemerintahan yang berada di wilayah kecamatan yang terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Barat. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan/Kelurahan. Terkait dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh kecamatan khususnya Kecamatan Jempang maka penulis memberikan gambaran tentang kecamatan Jempang yang merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 16 Kecamatan serta memiliki 194 Kampung/Kelurahan yang dimana salah satu kecamatannya bernama Kecamatan Jempang serta didalamnya memiliki 12 kampung yaitu Kampung Bekokong (Resak Bekokong), Lembonah, Mancong, Muara Nayan,

Muara Ohong, Muara Tae, Pentat, Perigiq, Pulau Lanting, Tanjung Isuy, Tanjung Jan, dan Tanjung Jone.

Untuk menciptakan kondisi kerjasama yang baik antar bidang yang dibawah oleh Camat maka dibutuhkan sebuah *softskill* manajemen koordinasi yang baik pula. Oleh karena itu, diantara bidang-bidang satuan kerja yang dibawah Camat harus saling mendukung dan bekerja sama sehingga terjalin hubungan harmonis yang menunjang kinerja dari setiap unit kerja itu sendiri.

Dari pengamatan penulis yang terjadi di Kecamatan Jempang pelaksanaan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya terkoordinasi secara maksimal oleh aparat pemerintah dilihat dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang belum memadai dari akses jalan yang belum adanya pengaspalan ke setiap kampungnya seperti dari pusat pemerintahan kecamatan dari Kampung Tanjung Isuy menuju Kampung Tanjung Jan akses jalan menuju Kampung Tanjung Jan dapat dilalui dengan jembatan yang keadaannya memprihatinkan dan jika musim penghujan tiba jembatan tersebut akan tenggelam tergenang banjir dan tentunya tidak dapat dilalui masyarakat setempat serta setelah melewati jembatan yang parah, akses transportasi jalan yang memiliki banyak kerusakan dan diperparah lagi jika musim penghujan tiba tanah yang kuning pun menjadi berlumpur. Kemudian akses menuju ke Kampung Tanjung Jone hanya bisa dilalui dengan jalur air dan jika banjir terlalu beresiko bagi masyarakat yang hendak melaluinya karena arus cukup deras, jika musim kemarau sungai akan surut dan ini cukup membahayakan masyarakat karena Ketinting (Perahu Kecil) mereka bisa saja menabrak kayu yang ada di dasar sungai,, saluran air bersih yang belum memadai dimana terdapat beberapa kampung yang tidak memiliki akses air bersih dari pemerintah. Salah satu kampung yang tidak memiliki sumber air bersih adalah kampung Tanjung jone dan kampung Muara Ohong, daerah ini hanya mengandalkan sumur bor saja yang dimiliki baik perorangan maupun sekelompok orang. Untuk pembuangan sampah dan tempat sampah pun baik pihak kecamatan maupun kampung masih memiliki banyak kendala untuk mewujutkannya, serta Listrik Umum yang masih menjadi kendala di beberapa kampung yaitu kampung Bekokong, Tanjung Jone, dan Muara Ohong. Berdasarkan observasi sementara maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan Koordinasi Camat dalam Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas diperlukan perumusan masalah yang sangat berguna bagi arah dan langkah penelitian supaya lebih jelas dalam melakukan penelitian. Adapun perumusan masalah yang diajukan oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana Koordinasi Camat Dalam Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat?

2. Apa Saja Faktor Yang Memengaruhi Koordinasi Camat Dalam Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis koordinasi camat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat.
2. Untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi Koordinasi Camat dalam Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat.

Kerangka Dasar Teori

Koordinasi

Adapun Hasibuan (2006:90), menjelaskan ada beberapa faktor yang berhubungan erat dan mempengaruhi pelaksanaan koordinasi, dalam artian jika faktor-faktor yang berhubungan tersebut diterapkan dengan baik maka koordinasi akan lebih mudah tercapai, faktor-faktor tersebut yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengisian jabatan dan pengendalian. Pendapat yang sama menurut Yahya (2006:95), koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Menurut Manullang (2008:72) koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Melakukan kegiatan koordinasi dengan berbagai cara seperti tersebut diatas adalah amat penting sebab adanya kegiatan koordinasi dapat menghoindarkan terjadi konflik mengurangi duolikasi tugas, meniadakan pengangguran, melenyapkan kepentingan unit sendiri dan mendukung kerja sama. Dengan koordinasi diharapkan akan tercipta syasana kerja sama, kesatuan tindakan dan kesatuan tujuan akhir.

Dari beberapa pengertian koordinasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian koordinasi adalah segala usaha mengarahkan, menselaraskan kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi yang mana tiap-tiap unit kerja saling mendukung untuk pencapaian tujuan.

Selanjutnya Menurut Kencana (2011:35), bentuk koordinasi yaitu sebagai berikut:

- a. Koordinasi Horizontal

Koordinasi horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan inkron antar lembaga-lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika

Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kaporles), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda).

b. Koordinasi Vertikal

Koordinasi vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga-lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu instansi kepada Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu instansi kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Bro lain diluar biro mereka.

c. Koordinasi Fungsional

Koordinasi fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar para sesama kepala bagian hubungan masyarakat.

Camat

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Infrastruktur

Effendi (2002:48) menyebutkan bahwa pentingnya infrastruktur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik prasarana jalan, air bersih, listrik, jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, transportasi, irigasi, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi.

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, fasilitas publik yang lain, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi, (Grigg dalam Kodoatie, 2005:8)

Pendapat yang sama pun dikemukakan oleh Kodoatie (2005:31), Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dalam sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan

Dari beberapa pendapat diatas penulis menyimpulkan pengertian infrastruktur adalah sarana dan prasarana fisik sebagai pendukung utama terselenggaranya proses pembangunan dalam menyediakan transportasi, bangunan-bangunan seperti gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan

untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkungan sosial dan ekonominya.

Pembangunan

Menurut Effendi (2002:48) menyebutkan bahwa pentingnya ketersediaan infrastruktur yang memadai, yang di antaranya ketersediaan fasilitas pelayanan publik yaitu:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Tempat Ibadah
- d. Listrik
- e. Jalan
- f. Jembatan
- g. Transportasi
- h. Air Bersih
- i. Drainase Teknologi dan Komunikasi

Pengertian Pembangunan

Menurut Rogers dalam Zulkarimen Nasution (2004), pembangunan diartikan sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial, sedangkan modernisasi menunjuk pada proses yang terjadi pada level individu. Pendapat yang sama Menurut Sondang P. Siagian (2008), pembangunan di definisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Faktor Penghambat Pembangunan

Pembangunan merupakan proses perubahan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan banyak dipengaruhi oleh kondisi fisik dan nonfisik dari suatu masyarakat, sehingga akselerasi (percepatan) pembangunan disetiap negara tidak sama. Menurut Tjokroamidjojo dalam Nawawi (2009), faktor yang mempengaruhi pembangunan dan mempunyai relevansi dengan kondisi masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Masyarakat yang masih tradisional
2. Masyarakat yang bersifat peralihan
3. Masyarakat maju (modern).

Selanjutnya menurut Damanhuri, (2010) menyatakan bahwa berdasarkan problema empiris ekonomi politik dan pembangunan di negara-negara sedang berkembang. Faktor-faktor yang menjadi tantangan, masalah, dan hambatan dalam menjalankan agenda pembangunan yang dapat dijadikan peluang atau ancamannya adalah:

1. Globalisasi

2. Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan
3. Industrialisasi, pertanian, dan informalisasi ekonomi
4. Korupsi, kebocoran, dan inefisiensi
5. Utang luar negeri
6. Lingkungan (ekologi)
7. Birokrasi

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yaitu:

1. Koordinasi Horizontal
2. Koordinasi Vertikal
3. Faktor yang Memengaruhi Pembangunan Infrastruktur

Hasil Penelitian

Koordinasi

Kecamatan menjadi koordinator di wilayah kerjanya dengan melaksanakan sebagian pelimpahan wewenang dari kepala daerah (Bupati/Walikota). Dalam hal ini ada dua tugas utama kecamatan yaitu sebagai pelayan masyarakat dan melakukan pembinaan wilayah. Tugas pembinaan wilayah dilakukan dengan melakukan koordinasi pemerintah terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggara ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undang, pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa atau kelurahan serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan atau instansi pemerintah lain di wilayah kecamatan.

Camat merupakan pemimpin di kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Barat Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Koordinasi Vertikal Camat dalam Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat

Pelaksanaan koordinasi yang bersifat vertikal menunjuk pada seberapa besar kegiatan koordinasi yang bersifat vertikal dilaksanakan. Hal ini terjadi karena camat selaku pimpinan di lingkungan pemerintah kecamatan harus dapat menjamin serta membentuk keselarasan dan keterpaduan terhadap para bawahan

aparatur pemerintahan dalam satu tujuan dan bekerjanya aparatur pemerintahan, maka diperlukan adanya pengaturan-pengaturan yang dapat berwujud peraturan pada tata tertib dan kerja sama secara keseluruhan didalam pelaksanaan koordinasi yang bersifat vertikal.

Koordinasi vertikal yang dilakukan oleh camat dengan pihak pemerintah kabupaten serta pihak pemerintah kecamatan dan pemerintah kampung dan jajaran instansi yang ada dibawahnya. Camat dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh perangkat pemerintah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Penyelenggara kegiatan yaitu camat sebagai koordinator dilaksanakan bersama petinggi kampung dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan menggunakan dana APBD dan Dana Alokasi Khusus(DAK). Petinggi Kampung melaksanakan kegiatan didalam wilayahnya bersama jajaran aparat kampung seperti kegiatan pembangunan semenisasi yang berkoordinasi dengan Rukun Tetangga(RT). Kegiatan yang dilaksanakan kecamatan saat ini adalah perbaikan jalan, perbaikan jembatan, pembangunan listrik antar kampung yang masih diupayakan, dan pengadaan air bersih di setiap kampung. Camat sebagai koordinator yang berkoordinasi baik itu dengan pihak kecamatan dan jajarannya maupun dengan pihak petinggi kampung.

Adapun koordinasi camat secara vertikal dengan Dinas Perkerjaan Umum (PU) menunjukan bahwa pemerintah daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Kecamatan Jempang telah melakukan koordinasi dalam upaya pemeliharaan jalan raya dan infrastruktur, karena melihat kondisi jalan yang sebelumnya rusak parah karena jalur ini salah satu jalan penghubung antar kampung dan ke kabupaten sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan pihak dari Kecamatan Jempang melakukan koordinasi Camat sebagai koordinator dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam upaya pemeliharaan jalan, agar setelah dilakukan perbaikan jalan dapat terpelihara dengan baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian Kecamatan Jempang khususnya masyarakat sekitar.

Kemudian bentuk koordinasi yang sudah disampaikan oleh Camat di Kecamatan Jempang pertimbangan berbagai kegiatan dalam pembangunan infrastruktur yang sedang dan akan dilakukan selalu di damping oleh pihak kecamatan kesepakatan hasil rapat yang menjadi solusi untuk memberikan perhatian khusus kepada semua kampung agar terjadi kesama rataan pembangunan infra struktur dalam pembangunan kampung. Setiap kampung memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda-beda, melalui kegiatan musyawarah ini Camat berupaya memberikan arahan yang mampu dilakukan oleh pihak kampung dalam pembangunan.

Koordinasi Camat dengan Petinggi Kampung dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, harus sinkronisasi atau berhubungan dan saling bekerjasama dalam melaksanakan pembangunan di kampung demi untuk kemajuan kampung, dan mensejahterakan masyarakat kampung melalui

musrembang desa membahas dan menyampaikan permasalahan-permasalahan yang di alami oleh kampung dan masyarakat agar cepet terselesaikan dengan baik. Dalam rapat musrembang desa yang di hadiri oleh pihak kecamatan sebagai berikut: Camat, Seketaris Camat, Kasi PMK, dan Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan. Dan dari pihak Kampung yaitu Petinggi Kampung, Seketaris Kampung, Ketua BPK, LPM, RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan boleh juga dihadiri oleh masyarakat umum untuk ikut serta dalam membahas mengenai program pembangunan baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan oleh kampung.

Pemerintah Kecamatan Jempang dan Pemerintah Kampung Tanjung Jone telah melaksanakan kerjasama serta berupaya memperbaiki dan meningkatkan dalam pembangunan infrastruktur baik jalan transportasi, listrik, jaringan alat komunikasi telpon maupun internet dan air sudah di upayakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat pun ikut berpartisipasi dalam pengelolaan pembangunan kampung diwilayah Kampung Tanjung Jone agar pembangunan yang di buat untuk masyarakat memang yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam kehidupanya sehari-hari.

Meskipun ada beberapa hambatan yang harus dihadapi sebagai daerah yang berada didataran rendah akan tetapi Pemerintah Kecamatan selalu bekerjasama dengan Pemerintah Kampung Tanjung jone, Camat sebagai koordinator penyelenggara dalam melaksanakan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat dapat diketahui secara keseluruhan bahwa program kegiatan dari pemerintah dapat terelisasi dengan optimal.

Koordinasi Horizontal Camat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat

Pelaksanaan koordinasi yang bersifat horizontal merupakan suatu bentuk mengkoordinasikan kegitan-kegiatan atau tindakan, penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegitan-kegiatan yang dilakukan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Upaya pelaksanaan koordinasi yang bersifat horizontal dilaksanakan oleh camat guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik antara instansi horizontal dengan dinas-dinas terkait daerah agar tercapai hasil sesuai peraturan pemerintah yang berlaku. Oleh sebab itu maka camat wajib melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dengan selalu berkoordinasi dengan pejabat atau instansi terkait yang setingkat di atasnya demi tercapainya kegiatan pembangunan, dimana salah satu faktor pentingnya dalam keberhasilan camat adalah meningkatkan frekuensi koordinasi yang bersifat horizontal.

Setiap pembangunan yang ada melalui proses dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kampung, kecamatan, tingkat kabupaten/provensi dan yang terakhir adalah musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat nasional. Pada tingkat kecamatan kita mengundang semua unsur yang ada di tingkat kecamatan dan pada saat itu dihadiri para dinas-dinas yang ada dikabupaten, dalam hal ini

pada saat musyawarah rencana pembangunan di sanalah kita membahas mengenai usulan-usulan dari berbagai pihak di kampung yang di mana apa bila muasyawarah tersebut membahas mengenai infrastruktur baik dari bidang pembangunan jalan, jembatan, listrik, tempat sampah dengan dinas terkait makan akan dibahas dengan dinas pekerjaan umum (PU), Dinas Cipta karya atau dinas kesehatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur bahkan kita juga mengundang pihak koramil yang mendukung penuh dalam pembanguana di Kampung Tanjung Isuy dan diberbagai kampung yang ada diwilayah Kecamatan Jempang demi pembangunan yang merata disetiap kampungnya.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan penulis mengetahui bahwa Koordinasi Camat secara horizontal dengan Aparat terkait telah melakukan koordinasi dalam upaya pembuatan maupun pemeliharaan jalan raya, jembatan dan infrastruktur lainnya, karena melihat kondisi jalan sebelumnya yang rusak parah karena digunakan masyarakat setempat dan perbaikan yang dilakukan oleh bantuan aparat pun tidak hanya tertuju pada satu Kampung saja, akan tetapi di semua kampung maupun jalan penghubung antar kampung. Bila jalan terpelihara dengan baik maka akan mempermudah aktifitas masyarakat dan memperlancar perekonomian antar masyarakat juga khususnya wilayah Kecamatan Jempang dan sekitarnya.

Faktor yang Memengaruhi Koordinasi Camat dalam Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Jempang

Adapun faktor yang memengaruhi koordinasi vertikal, Koordinasi Camat dalam Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat yaitu :

1. Kondisi Geografis

Kondisi lapangan di beberapa daerah berada di dataran rendah sehingga mengakibatkan pembangunan lambat dan terhambat. Akses transportasi jalan yang berpengaruh dalam pembangunan infrastruktur, Seperti jembatan penghubung antar kampung yaitu Kampung Tanjung Isuy ke wilayah Kampung Tanjung Jan yang dimana akses jembatan yang sangat kurang memadai serta Kampung Tanjung Isuy ke wilayah Kampung Tanjung Jone yang dimana akses transportasi jalan hanya bisa lewati jalur air di Danau Jempang.

2. Penyediaan Bahan Material

Pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan dalam daerah merupakan rangkaian kegiatan untuk terjadinya pembangunan akan tetapi faktor lingkungan mempengaruhi dalam penyediaan bahan material dalam hal ini akses antar daerah merupakan hal yang penting untuk mendistribusikan bahan material, Pemerintah daerah berupaya memaksimalkan kegiatan pembangunan antar kampung tetapi karena akses jalan yang bisa saja terhambat dikarnakan musim hujan, jembatan yang rusak, dan kemarau akan

membuat pengerjaan bangunan pun jadi terhambat dan terlambat dalam pembuatannya.

3. Alat Teknologi

Merupakan alat komunikasi yang sangat penting dan membantu dalam melaksanakan koordinasi secara tidak langsung dan sangat mudah dalam penggunaannya sehingga bisa digunakan dalam mendukung efektifitas pekerjaan. Di kampung tanjung jone alat komunikasi terganggu karena susah sinyal. Sinyal paling bagus yang bisa didapatkan berada dipelabuhan kampung tanjung jone.

4. Komunikasi

Komunikasi Camat dan Petinggi Kampung sangat di perlukan untuk sebuah kegiatan pembangunan antar daerah tiap kampungnya yang akan dilaksanakan dalam pembangunan.

Adapun faktor yang memengaruhi koordinasi Horizontal, Camat dalam Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut :

1. Kesiapan Instansi yang sederajat yang mau bekerja sama

Koordinasi Horizontal dilakukan Camat dalam pembangunan infrastruktur di Kecamatan Jempang dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU), dalam pemeliharaan jalan dan infrastruktur melalui sebuah kesepakatan dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan jalan raya, sehingga konflik internal dan eksternal dapat di netralisir dan proses perbaikan dan pemeliharaan jalan di wilayah Kecamatan Jempang menjadi lebih efektif dan efisien.

2. Perizinan

Dalam hal perizinan baik pihak pemerintah kampung maupun pemerintah kecamatan memerlukan musyawarah bersama dalam mengambil keputusan yang mana hasil keputusan yang ada akan disampaikan ke Pemerintah Kabupaten.

3. Dana

Melalui Dana dari Pemerintah Pusat yang di salurkan melalui pemerintah daerah sebagai pelopor untuk berbagai kegiatan yang akan di laksanakan baik dalam kegiatan pemerintah maupun dalam infrastruktur untuk keperluan masyarakat. Dimana pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata yang mendistribusikan kemajuan-kemajuan yang ada di perkotaan, kesemua kampung yang ada di wilayah kutai barat. Diharapkan dengan pembangunan yang merata terebangnya infrastruktur di semua daerah di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Dalam Pembangunan, dana merupakan faktor yang memengaruhi pembangunan infrastruktur oleh karena itu komunikasi Camat sebagai Koordinator di wilayah Kecamatan Jempang dengan Instansi terkait sangat memengaruhi pembangunan infrastruktur yang ada.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Koordinasi Vertikal

Koordinasi vertikal dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat yaitu Camat sebagai koordinator pelaksana penyelenggaraan kegiatan pemerintah di wilayah kerja kecamatan sudah melaksanakan koordinasi akan tetapi belum maksimal, dikarenakan adanya beberapa hambatan dalam kondisi geografis. Melalui musrembang dan kesepakatan bersama, Camat berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) melalui kerjasama dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan penghubung antar kampung Tanjung Isuy dan kampung Tanjung Jan. Sedangkan dengan pihak pemerintah kampung, Camat sebagai pembina penyelenggaraan pemerintah kampung berkoordinasi terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan yang merupakan jalannya kegiatan pembangunan.

2. Koordinasi Horizontal

Pelaksanaan koordinasi yang bersifat horizontal yang telah dilaksanakan dengan baik melalui musrembang kecamatan, Camat berkerjasama dengan Koramil dalam pembangunan infrastruktur perbaikan jalan dan Jembatan yang rusak di wilayah Kecamatan Jempang.

3. Faktor yang memengaruhi koordinasi Camat Dalam Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Jempang yaitu :

a. Koordinasi Vertikal

a) Kondisi lapangan

Kondisi geografis di beberapa daerah berada di dataran rendah sehingga mengakibatkan pembangunan lambat dan terhambat. Akses transportasi jalan yang berpengaruh dalam pembangunan infrastruktur, seperti jembatan penghubung antar kampung yaitu Kampung Tanjung Isuy ke wilayah Kampung Tanjung Jan yang dimana akses jembatan yang sangat kurang memadai serta Kampung Tanjung Isuy ke wilayah Kampung Tanjung Jone yang dimana akses transportasi jalan hanya bisa lewat jalur air di Danau Jempang.

b) Alat Teknologi

Merupakan alat komunikasi yang sangat penting dan membantu dalam melaksanakan koordinasi secara tidak langsung dan sangat mudah dalam penggunaannya sehingga bisa digunakan dalam mendukung efektifitas pekerjaan. Di kampung Tanjung Jone alat komunikasi terganggu karena susah sinyal. Sinyal paling bagus yang bisa didapatkan berada dipelabuhan kampung Tanjung Jone.

b. Koordinasi Horizontal

a) Kesiapan Instansi yang sederajat yang mau bekerja sama

Koordinasi Horizontal dilakukan Camat dalam pembangunan infrastruktur di Kecamatan Jempang dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU), dalam pemeliharaan jalan dan infrastruktur melalui sebuah kesepakatan dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan jalan raya, sehingga konflik internal dan eksternal dapat di netralisir dan proses perbaikan dan pemeliharaan jalan di wilayah Kecamatan Jempang menjadi lebih efektif dan efisien.

b) Dana

Melalui Dana dari Pemerintah Pusat yang di salurkan melalui pemerintah daerah sebagai pelopor untuk berbagai kegiatan yang akan di laksanakan baik dalam kegiatan pemerintah maupun dalam infrastruktur untuk keperluan masyarakat. Di mana pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata yang mendistribusikan kemajuan-kemajuan yang ada di perkotaan, kesemua kampung yang ada di wilayah kutai barat. Diharapkan dengan pembangunan yang merata terebangnya infrastruktur di semua daerah di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Dalam Pembangunan, dana merupakan faktor yang memengaruhi pembangunan infrastruktur oleh karena itu komunikasi Camat sebagai Koordinator di wilayah Kecamatan Jempang dengan Instansi terkait sangat memengaruhi pembangunan infrastruktur yang ada.

Saran

1. Sebaiknya akses penghubung jalan transportasi yang layak antar kampung Tanjung Isuy ke wilayah kampung Tanjung Jan yang melalui jalan berlumpur atau tanah kuning yang di perbaiki dengan menggunakan batu koral sehingga jalan berlumpur atau tanah kuning yang dilalui setiap musim hujan tidak akan mengganggu aktivitas antar wilayah dan koordinasi pemerintah kecamatan serta pemerintah kampung tidak terkendala dalam menjalankan kerjasama.
2. Sebaiknya alat penghubung teknologi yaitu adanya pembuatan tower sangat diprioritaskan pembangunannya baik jaringan handphone dan jaringan internet. Sebagai faktor yang mendukung dalam kegiatan disegala urusan mengenai peningkatan koordinasi camat dan kepala kampung dalam pelayanan pemerintah serta memudahkan masyarakat di wilayah tersebut dalam berkomunikasi tidak langsung.
3. Diharapkan agar aparaturnya Pemerintahan Kampung khususnya Petinggi Kampung Tanjung Isuy, Kampung Tanjung Jan dan Kampung Tanjung Jone Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat memperbaiki proses penyampaian laporan pertanggung jawaban tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan nilai-nilai akuntabilitas kepada masyarakat kampung

lebih transparan sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana pengelolaan ADD dalam pembangunan infrastruktur.

Daftar Pustaka

- Damanhuri, D. S. 2010. *Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang*. Bogor: IPB Press.
- Effendi, Bachtiar, 2002, *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*, Yogyakarta, Uhaiindo dan Offset.
- Hasibuan, Malayu. S. P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Manullang. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI)
- Nasution, Z. 2004. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, I. 2009. *Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian, Konsep, Model, Teori, dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Robert J. Kodoatie. 2003. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Siagian, S. P. 2008. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.
- Yohanes, Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sumber Dokumen :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dalam Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Barat.